

Faktur Pajak

Nama: SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat: JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN
CENTRAL NIAGA P NO.6, KOTA ADM. JAKARTA
BARAT #0715420659018000000000

Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak: 04002500224579748

Pengusaha Kena Pajak:

Nama : SIMON ELEKTRIK INDONESIA
Alamat : JALAN GREEN LAKE CITY RUKAN CENTRAL NIAGA P NO.6, RT 007, RW 008, DURI KOSAMBI,
CENGKARENG, KOTA ADM. JAKARTA BARAT, DKI JAKARTA 11750
NPWP : 0715420659018000

Pembeli Barang Kena Pajak/Penerima Jasa Kena Pajak:

Nama : FUJI BUILDING MATERIAL TRADING
Alamat : JALAN RAYA KARET KOTABUMI JALAN RAYA IRIGASI CISADANE BARAT NO.KAV 28, RT 003, RW 003,
PERIUK, PERIUK, KOTA TANGERANG, BANTEN 15131 #0964300131086000000000
NPWP : 0964300131086000
NIK : -
Nomor Paspor : -
Identitas Lain : -
Email: fujibuildingmaterialtrading01@gmail.com

No.	Kode Barang/ Jasa	Nama Barang Kena Pajak / Jasa Kena Pajak	Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin (Rp)
1	392600	Kotak Pemasangan Inbow Rp 2.508,11 x 10.050,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	25.206.505,50
2	392600	1 Gang Mounting Box Rp 2.717,12 x 600,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	1.630.272,00
3	853600	Sakelar 2 Tombol 1 Arah Rp 22.599,10 x 30,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	677.973,00
4	853600	Sakelar 1 Tombol 1 Arah Rp 18.131,53 x 10,00 Unit Potongan Harga = Rp 0,00 PPnBM (0,00%) = Rp 0,00	181.315,30
Harga Jual / Penggantian / Uang Muka / Termin			27.696.066,00
Dikurangi Potongan Harga			0,00
Dikurangi Uang Muka yang telah diterima			
Dasar Pengenaan Pajak			25.388.060,00
Jumlah PPN (Pajak Pertambahan Nilai)			3.046.567,00
Jumlah PPnBM (Pajak Penjualan atas Barang Mewah)			0,00

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa Faktur Pajak ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan basah pada Faktur Pajak ini.



KOTA ADM. JAKARTA BARAT, 26 Juli 2025



Ditandatangani secara elektronik
ZHU, JIANGUO

(Referensi: 70CH-250724-0001)

Pemberitahuan: Faktur Pajak ini telah dilaporkan ke Direktorat Jenderal Pajak dan telah memperoleh persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. PERINGATAN: PKP yang membuat Faktur Pajak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan/atau sesungguhnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (9) UU PPN dikenai sanksi sesuai dengan Pasal 14 ayat (4) UU KUP.

2 dari 2